

**PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
(Studi Kasus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung
Kabupaten Lombok Utara)**

Lalu Moh. Nazar Fajri, SE., MPA¹

NIDN. 0812118502

Email: elemenef@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat setelah pembangunan infrastruktur, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan yang ada di wilayah Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, serta aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan unit analisis informan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *pertama*, infrastruktur jalan desa yang telah dibangun tahap demi tahap memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada khususnya masyarakat di wilayah Desa Jenggala. *Kedua*, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan serta tingkat pendidikan juga mempengaruhi laju peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

This study aims to determine the extent of the livelihoods of the people after the construction of infrastructure, especially in the construction of road infrastructure that exist in the region Desa Tanjung Jenggala District of North Lombok, as well as aspects related to public participation in the development of village infrastructure. The approach taken in this study is a qualitative approach using informants analysis unit with data collection through in-depth interviews and document study. The analysis used is qualitative descriptive analysis. The results showed that: first, rural road infrastructure that has been built step by step provides a considerable influence on the improvement of the livelihoods of communities in the region, especially people Jenggala Village. Second, the aspects related to public participation that is the number of family welfare and occupations and education levels also affect the rate of improvement of the livelihoods of the communities themselves.

Keywords: *Infrastructure development, Prosperity, Community participation*

¹ Dosen tetap yayasan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat mulai menyiapkan perencanaan program yang dimaksud khususnya Bidang PU/Cipta Karya melalui penyiapan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai embrio terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas. Dengan adanya RPIJM tersebut, Kabupaten Lombok Utara dapat menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan daerah, mendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni (*liveable*).

RPIJM yang disusun perlu memperhatikan aspek kelayakan program dari masing-masing kegiatan dan kelayakan spasialnya sesuai scenario pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang yang ada, serta kelayakan social dan lingkungannya. Disamping itu RPIJM yang akan disusun daerah harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program investasi yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat mengakomodasikan dan merumuskan kebutuhan pembangunan Kabupaten Lombok Utara, secara spesifik, sesuai dengan karakteristik dan potensi Kabupaten Lombok Utara agar dapat mendorong pembangunan ekonomi local, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan yang

sesuai dengan kebutuhan nyata dapat dicapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengembangkan amanat Undang-Undang penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah daerah yang tangguh, profesional dan mampu bersaing secara global..

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam teori pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.

Secara umum Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa dan memperlancar mobiltas masyarakat. Melihat kondisi ini, peniliti berusaha untuk mengungkapkan seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dapat terjawab bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa jenggala.

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian tentang masalah yang diteliti maka perlu diidentifikasi masalah terkait dengan judul diatas yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
3. dengan membangun atau memperbaiki prasarana transportasi (jalan) akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa.
4. meningkatnya mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan.

2. Pembatasan Masalah

Dengan banyaknya permasalahan yang telah dibahas diatas serta mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki penulis dari segi waktu, biaya, tenaga, pengetahuan dan referensi dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis akan memberikan batasan pada penelitian yaitu pembangunan infrastruktur jalan sebagai variabel bebas dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikat dengan fokus penelitian di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

3. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan jurnal, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan pada uraian diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pembangunan infrastruktur jalan ?
2. Berapa besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara ?

4. Tujuan Penelitian

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk menentukan arah yang tepat bagi peneliti untuk menghindari

kesulitan yang mungkin terjadi dalam proses penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jenggala.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jenggala.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan pada umumnya, khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
2. Manfaat Secara Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial secara berencana dengan meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam rangka kesejahteraan ekonomi,

modernisasi, kemajuan bangsa, wawasan lingkungan da bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidup (Bintoro Tjokroamidjoyo). Jadi pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam konteks bidang ekonomi maupun social yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan social.

2. Pengrtian Infrastruktur

Infrastruktur menurut Canning dan Pedroni (2004, h.11) menyatakan bahwa “infrastuktur memiliki sefat ekstenalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi. Menurut Mankiw (2003, h.38) infrastruktur merupakan “wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari inverstasi yang dilakukan pemerintah, infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembangunan.

Menurut Grigg dalam Kodoatie (2003, h.32), bahwa “sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-pralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

3. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Friedlander dalam Suud (2006, h.8) mengakatan bahwa kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang

dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Definisi tersebut merupakan definisi kesejahteraan sosial sebagai sebuah keadaan, yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu agar menciptakan suasana yang harmonis dan sejahtera.

4. Pengertian Masyarakat

Menurut Mac Iver dan Page dalam (Soekanto 1999, h.26) "Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia".

Kemudian menurut Soekanto (2006, h.26) "masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan".

5. Pengertian Desa

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003, h.3), mengatakan bahwa Desa adalah "sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pengerian Masyarakat Desa

Menurut R. Bintarto (2002, h.18) "Masyarakat Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain". Secara awam masyarakat desa sering diartikan sebagai masyarakat tradisional dari masyarakat primitif (sederhana). Namun pandangan tersebut sebetulnya kurang tepat, karena masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di suatu kawasan, wilayah, teritorial tertentu yang disebut desa. Sedangkan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang menguasai ipteknya rendah sehingga hidupnya masih sederhana dan belum kompleks. Memang tidak dapat dipungkiri masyarakat desa dinegara sedang berkembang seperti Indonesia, ukurannya terdapat pada masyarakat desa yaitu bersifat tradisional dan hidupnya masih sederhana, karena desa-desa di Indonesia pada umumnya jauh dari pengaruh budaya asing/luar yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pola hidupnya.

7. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Desa

Menurut Walter A. Friedlander (1961) "Kesejahteraan masyarakat desa adalah sistem yang terorganisir dari

pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat”.

Pembangunan infrastruktur jalan yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan meyongsong era globalisasi yang telah dihadapi oleh Indonesia saat ini. Jalan memberikan peran yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, sehingga akan diperoleh kapasitas produktif dari sumber daya manusia, serta diperolehnya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (1990:64) bentuk deskriptif adalah bentuk penelitian yang memusatkan pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan

beberapa cara diantaranya : dokumen kuesioner, Wawancara, pengamatan, buku dan dari halaman web.

teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik kualitatif. Menurut Farid (1997, h.152) bahwa analisa kualitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta, data dan informasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan yang dilakukan baik dari proses perencanaan, pelaksanaan juga pengawasannya partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting sehingga dapat memunculkan arah kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Adapun arah kebijakan pembangunan yang dapat peneliti sajikan adalah merupakan permasalahan dan isu strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jenggala yang merupakan himpunan dari keseluruhan permasalahan yang ada yang berhasil dituangkan dalam RPJMDesa.

Dari tahun 2014 Pemerintah Desa telah membuat kebijakan-kebijakan bersama dengan badan perwakilan desa (BPD) dan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program-program kegiatan yang dilaksanakan hingga tahun 2017, baik program/kegiatan yang bersumber dari Dana APBN, APBD I, APBD II, APBDES maupun swadaya murni masyarakat, sebagaimana tertuang dalam hasil Musrembang dan APBDes tahun 2014 yang meliputi program /kegiatan

Fisik dan Non Fisik, dimana program/kegiatan tersebut dimunculkan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Desa JENGALA secara menyeluruh. Untuk lebih terarahnya pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa mengadakan Musrembang dengan melibatkan semua unsur dengan mekanisme :

- Mengevaluasi rencana pembangunan sebelumnya yang tertuang dalam Musrenbang kemudian mengangkat kembali jenis usulan yang belum terealisasi serta menambah dengan usulan baru yang telah sisepakati bersama.
- Menentukan skala prioritas jenis usulan tentang pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek kemudian menyesuaikan jalur pengusulan dan pembiayaan baik melalui swadaya, APBDES, Pemerintah Kabupaten, Propinsi ataupun APBN.
- Mengatur Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jenggala Sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Alokasi Dana Desa sehingga hasil kegiatan akan maksimal.

b. Potensi

Di dalam pelaksanaan program pembangunan desa tidak terlepas dari kajian potensi dan masalah yang ada di desa. Adapun Potensi dan permasalahan yang menjadi skala prioritas untuk 5 tahun kedepan sbb :

1) Potensi :

1. Bidang Sarana Prasarana : luasnya lahan perkebunan, adanya material 17 Lokal
2. Bidang Ekonomi : Adanya BUMDES, adanya Program SPP PNPM MP, adanya Kelompok Usaha

3. Bidang Sosial Budaya : adanya program pemberdayaan masyarakat, adanya program raskin.
4. Bidang pendidikan : tersedianya tenaga pengajar, adanya dana BOS, adanya program beasiswa melalui PNPM-GSC.
5. Bidang Kesehatan : tersedianya tenaga kesehatan dan kader posyandu
6. Bidang Pemerintahan : tersedianya aparat dan perangkat desa, adanya dana peningkatan kapasitas kelembagaan melalui ADD.

c. Masalah

1. Bidang Sarana Prasarana : masih adanya masyarakat yang belum memiliki listrik, kondisi jalan dusun yang masih rusak dan kondisi jaringan perpipaan yang belum memadai, masih banyak rumah kumuh.
2. Bidang Ekonomi : masih tingginya tingkat pengangguran, keterampilan masyarakat masih rendah, masih lemahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses modal usaha.
3. Bidang Sosial Budaya : belum adanya upaya pemberdayaan masyarakat miskin, masih banyak masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam penerima raskin.
4. Bidang pendidikan : masih banyak anak yang tidak mampu dan putus sekolah pada usia wajib belajar 9 tahun, belum ada gedung PAUD.
5. Bidang Kesehatan : masih kurangnya sarana dan prasarana posyandu, kurangnya penyuluhan tentang PHBS, masih banyak masyarakat yang belum menerima kartu BPJS
6. Bidang Pemerintahan : pengelolaan administrasi desa masih kurang, dan insentif aparat desa masih kurang, kurang diberdayakan lembaga-lembaga Desa.

d. Strategi dan Pencapaian Pembangunan

Untuk mengatasi isu-isu strategis yang berkembang sampai 5 tahun mendatang perlu dipertegas dengan langkah-langkah sebagai tindakan yang diprioritaskan untuk mengatasi isu-isu, arah kebijakan dan strategi pencapaian, ini berdasarkan hasil pengkajian sbb :

1. Keagamaan

Agama merupakan pondasi utama dalam menjadikan manusia bisa hidup damai dan tenteram karena melalui ajaran agama manusia akan bisa bersyukur, saling menghargai, kasih sayang serta segala hal yang sangat mendasar, dengan demikian maka akan terjalin toleransi antar umat beragama sehingga program pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Di desa Jenggala terdapat beberapa jenis agama misalnya : Islam, Hindu, Budha dengan prosentase terbesar adalah Islam, namun demikian kenyataannya masyarakat dapat hidup rukun saling membaur serta saling bantu membantu bila ada kegiatan kemasyarakatan, sehingga perbedaan agama yang ada bukan menjadi suatu masalah tetapi menjadi suatu yang dapat memberikan efek yang positif.

2. Kesehatan

Dalam rangka Menindak lanjuti program yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah kaitannya dengan kesehatan masyarakat pemerintah Desa Jenggala terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan PUSKESMAS Tanjung dan PLKB Kecamatan Tanjung dalam rangka memberikan penyuluhan dan pembinaan serta pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk dimaklumi bahwa masyarakat Desa Jenggala sebagian besar hidupnya dibawah garis

kemiskinan sehingga kebijakan pemerintah dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat miskin khususnya dibidang kesehatan adalah dengan memberikan/menerbitkan Kartu JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)/ ASKESKIN yang kemudian ditindak lanjuti dengan kebijakan Pemerintah desa dengan memberikan/ menerbitkan SKTM bagi masyarakat miskin yang terdaftar sebagai masyarakat miskin tapi tidak mendapatkan Kartu JAMKESMAS/ASKESKIN disamping kegiatan-kegiatan lain yang kita laksanakan seperti Posyandu yaitu peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat.

3. Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu pendidikan formal dan pendidikan Non formal dalam pendidikan non formal seperti sekolah SDN, SLTP, SLTA sedangkan pendidikan non formal yaitu melalui paket, seperti Paket A , B dan C ini bertujuan untuk menuntaskan Buta Aksara serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berbudi luhur, kreatif, inovatif, berdisiplin dan bertanggung jawab.

Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan masyarakat dengan pemerintah desa adalah :

1. Bekerja dengan pengurus PKBM untuk melaksanakan program-program pendidikan misalnya, Program Pengentasan Buta Aksara, merancang pendirian PAUD dan lain-lain.
2. Pendataan masyarakat Buta Aksara di Desa Jenggala yang dilakukan enam (6) dusun, bekerjasama dengan Kepala Dusun dan SPMD.

3. Sosialisasi Pendidikan bekerjasama dengan KKN Unram dan PNPM-Gsc.

4. Sosial Budaya

Seiring kemajuan dan pencapaian hasil pembangunan yang kini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, dimana masih menyisakan masalah-masalah sosial yang harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama, pengangguran dan kemiskinan adalah problema sosial yang mendominasi diantara problema-problema sosial yang ada, sehingga membuat Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah prepentif untuk penanggulangan. Diantaranya berbagai upaya dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan tetapi sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan hal ini disebabkan karena berbagai kendala. Pemberdayaan dan pembinaan budaya diarahkan pada pembinaan kelompok seni budayalocal yang saat ini sdh mulai memudar sehingga sangat diperlukan perhatian semua pihak untuk menjaga dan melestarikan budaya local agar warisan budaya itu bisa disampai kepada generasi berikutnya.

5. Keamanan

Pada umumnya kondisi keamanan dan ketertiban di Desa Jenggala selama tahun 2015 dan 2016, aman dan terkendali, Pemerintah Desa selaku pemegang dan sekaligus penanggung jawab dari sebuah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahannya di Desa terus berusaha seoptimal mungkin dengan terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian, Pemerintah Kecamatan dalam rangka memberikan pembinaan kepada masyarakat disamping itu tetap mengoptimalkan peran dari Linmas desa dan kepala-kepala dusun sebagai ujung tombak dalam memberikan pembinaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dengan kerjasama dan partisipasi dari semua semua komponen masyarakat serta pihak-pihak yang terkait keamanan dan ketertiban di Desa Jenggala dapat terus terjaga disamping itu dengan adanya pembuatan pos keamanan dimasing masing dusun dan diaktifkannya kembali kegiatan Ronda Malam.

d. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan didesa Jenggala baik yang didanai oleh Bantuan Program Pemerintah Kabupaten, Provinsi ataupun Dana yang bersumber dari Pusat secara umum telah selesai 100 % dilaksanakan sesuai rencana kegiatan.

Akan tetapi terkait dengan berbagai perencanaan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa Jenggala yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDesa) melalui Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2013 yang selanjutnya merupakan dasar usulan kejenjang lebih lanjut dalam hal ini Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten, akan tetapi usulan desa yang telah diusulkan pada dasarnya ada yang terealisasi dan ada juga yang tidak dapat direalisasikan.

e. Satuan Pelaksana Kegiatan Pembangunan

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didesa melibatkan berbagai pihak terutama lembaga desa dan perangkat desa serta unsur tokoh agama dan tokoh masyarakat, kelompok marginal, perempuan dan KPMD dan lain-lain. Secara ringkas satuan pelaksana kegiatan ditingkat desa Jenggala adalah sebagai berikut :

- Penanggung jawab Kepala Desa Jenggala

- Ketua Pelaksana Sekretaria Desa
- Anggota – Anggota :
 - ✓ Kepala – Kepala dusun,
 - ✓ LPM,
 - ✓ KPMD,
 - ✓ Tokoh masyarakat dan Tokoh Masyarakat

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan didesa Jenggala merupakan secara rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun terutama pada awal tahun anggaran yang diawali dari proses Penggalan Gagasan ditngkat dusun yang bertujuan untuk menjangking usulan dari masyarakat dan selanjutnya disampaikan pada saat MusrenbangDesa dalam rangka menyempurnakan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang telah tertuang dalam dokumen RPJMDesa untuk selanjutnya dibawa dan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan.dalam pelaksanaan Musrenbang desa melibatkan Perangkat Desa, Kepala Dusun, LPM, BPD, PKK, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, wakil perempuan, KPMD, serta banyak unsur yang lain.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbangdesa dibentuk Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Ketua : Sekretaris Desa
- Sekretaris : Ketua LPM
- Anggota : Tokoh

masyarakatdan Unsur Perempuan

Selanjutnya Tim Pelaksana akan mengawal jalannya Proses Musrenbang dan melaporkan hasil yang disepakati.

g. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan pembangunan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat ataupun kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Daerah, pada tahun 2013 Pemerintah Desa Jenggala telah memperakarsai berbagai kegiatan

kemasyarakatan secara swadaya diantaranya adalah Gotong royong perabatan jalan Jangkar yangmerupakan prioritas Pemerintah Desa dalam rangka memudahkan akses transportasi dan ekonomi masyarakat. Peningkatan Kualitas jalan ini dilaksanakan dengan bantuan PNPM-MPd (baca: sekarang menjadi BKAD) dimana kondisi sebelumnya hanya merupakan jalan setapak dan pada saat ini kondisi jalan walaupun belum dapat dilalui dengan layak oleh kendaraan roda dua akan tetapi masyarakat sangat antusias karena ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan dusun jangkar dengan dusun lain. Hal ini dapat terlaksana tentu berkat dukungan dari pemilik lahan yang telah memberikan secara ikhlas sebagian tanahnya untuk dipergunakan sebagai badan jalan. Pada awalnya Pemerintah desa Jenggala mengalami kesulitan akan tetapi dengan dukungan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama maka semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Partisipasi masyarakat di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung pada proses pembangunan infrastruktur desa dan Jalan Desa pada khususnya yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan berupa kehadiran dan ide atau pemikiran. Pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, material dan dana. Sementara pada tahap pemeliharaan, bentuk partisipasi hanya berupa sumbangan tenaga.
- b. Aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari jumlah keluarga sejahtera dan jenis

pekerjaan dalam hal ini tipe pertanian dan nelayan memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat pada semua tahap, sementara tingkat pendidikan hanya berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada tahap persiapan.

2. Saran

- a. Tujuan pembangunan infrastruktur jalan perdesaan dengan pendekatan partisipatif adalah mensejahterakan masyarakat dan bukan bertujuan membantu pemerintah dalam penyediaan dana. Tentunya dari hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu penentu sasaran kontribusi masyarakat, tidak menjadikan bahwa desa yang harus dibangun lebih dulu adalah desa dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, karena tingkat partisipasinya juga tinggi. Seharusnya malah sebaliknya, agar pemerataan pembangunan lebih dapat terasa.
- b. Selain itu dalam penelitian ini juga dihasilkan bahwa faktor waktu yang dimiliki oleh masyarakat juga ikut menentukan partisipasinya. Untuk itu mungkin perlu dibuat mekanisme yang berbeda pada tarap pelaksanaan kegiatan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan (2006). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dr. Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian, Kuantitatif Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- <http://jsarwono.psend.com/bab8.html>
- Sarwono, J. *Bab VIII. Menyusun Definisi Operasional Variabel*. Diakses pada tanggal 25 Desember 2011.
- Jabareen, Yosef, 2009. *Building a Conceptual Framework: Philosophy, Definition and Procedure*. International Jurnal Qualitative Method. International Institute For Qualitative Methodology. University Of Alberta.
- Kodoatie, R.J. *“Menajemen dan Rekayasa, ‘Infrastruktur’*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Mankiw, N.Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi (Haris Munandar, Penerjemah)*. Jakarta: Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu. *“Pembangunan Masyarakat”*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Jakarta.
- Purwatiningsih, A Ismani (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA, Vol.IV. No.2, 1-24
- Siagan, Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Soekanto, Soejono. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Kesejahteraan*

- Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufiqullah, Muhammad (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa*. Tesis ITB.
- Sarwono, J. *Bab VIII. Menyusun Definisi Operasional Variabel*. Diakses pada tanggal 25 Desember 2011, dari: <http://jsarwono.psend.com/bab8.html>
- Suhirman dan Wagiyo (2005), *Merumuskan Konsep dan praktek partisipasi warga dalam pelayanan publik*. FPPM Bandung.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yashin, Sulcahn. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosakata Baru*. Surabaya: Amanah.